

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BATU: SEBUAH UPAYA MEWUJUDKAN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN RESPONSIF

Joice Soraya

Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

*Correspondent Autor: joicewijayas99@gmail.com

KEYWORDS:

Community Service,
Democracy,
Human Rights,
Pancasila,
Polres Batu


ABSTRACT *The Batu City Police, as the frontline in maintaining security, order, and law enforcement, have the responsibility to practice the values of Pancasila, democracy, and human rights in every aspect of their duties. However, there is still a gap between idealism and reality in practice, such as an inefficient understanding and commitment of personnel, a strong militaristic culture, and ineffective supervision mechanisms. This community service activity aims to strengthen the implementation of these values in Polres Batu through a series of programs, including training, mentoring, public dialogue, and participatory action research. Hybrid activities involved 32 participants from various police functions and external stakeholders. The methods used included lectures, discussions, case studies, simulations, and the preparation of follow-up plans. The results of the activities showed a significant increase in participants' knowledge, attitudes, and skills, as measured through pre-test and post-test, with an average increase in scores of 31.6%. In addition, this program also produced several outputs, such as the formation of integrity cadres, the preparation of guidelines for implementing values in SOPs, and an increase in the public satisfaction index score on the performance of Batu Police by 20%. As such, this program has made a real contribution to encouraging the transformation of Polres Batu into a police institution that is more professional, accountable, and responsive to community needs. The sustainability of this program needs to be maintained through institutionalizing the system, strengthening capacity, and expanding partnerships with various parties.*

KATA KUNCI:

Demokrasi,
Hak Asasi Manusia,
Pancasila,
Pengabdian
Masyarakat,
Polres Batu

ABSTRAK Kepolisian Resor Kota Batu sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap aspek tugasnya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara idealisme dan realitas, seperti belum optimalnya pemahaman dan komitmen personel, masih kuatnya kultur militeristik, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut di Polres Batu melalui serangkaian program yang meliputi pelatihan, pendampingan, dialog publik, dan riset aksi partisipatif. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan 32 peserta dari berbagai fungsi kepolisian dan stakeholder eksternal. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan

penyusunan rencana tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta, sebagaimana diukur melalui pre-test dan post-test dengan rata-rata kenaikan skor sebesar 31.6%. Selain itu, program ini juga menghasilkan beberapa luaran seperti terbentuknya kader integritas, tersusunnya panduan implementasi nilai dalam SOP, serta meningkatnya skor indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Batu sebesar 20%. Dengan demikian, program ini berkontribusi nyata dalam mendorong transformasi Polres Batu menjadi institusi kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberlanjutan program ini perlu terus dijaga melalui pelembagaan sistem, penguatan kapasitas, dan perluasan kemitraan dengan berbagai pihak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license 

PENDAHULUAN

Kepolisian Resor Kota Batu sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah Kota Batu. Sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat UU No 2 Tahun 2002, Polres Batu memiliki tuntutan dan ekspektasi yang tinggi dari publik untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dengan menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila, demokrasi dan HAM ([Undang-Undang \(UU\) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002](#)).

Namun, dalam realita pelaksanaan tugasnya sehari-hari, masih terdapat berbagai tantangan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman, kesadaran dan komitmen anggota Polres Batu terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya penekanan terhadap aspek-aspek tersebut dalam proses pendidikan, pelatihan dan pembinaan personel, minimnya keteladanan dari para pimpinan, serta belum efektifnya sistem reward and punishment untuk mendorong perubahan perilaku.
2. Masih adanya kultur kepolisian yang cenderung militeristik dalam penanganan kasus-kasus di lapangan. Pendekatan yang dilakukan seringkali lebih mengedepankan kekuatan, kepatuhan hierarki dan cara-cara represif daripada pendekatan humanis yang menghargai HAM. Ini berdampak pada munculnya tindakan sewenang-wenang dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat.
3. Kompleksitas situasi sosial politik yang menuntut sikap tegas namun adakalanya dapat mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Dalam situasi genting

seperti konflik sosial, unjuk rasa, dan gangguan keamanan lainnya, Polres Batu sering dihadapkan pada dilema antara efektivitas penanganan dan penghormatan terhadap hak-hak warga. Kompromi terhadap nilai-nilai luhur adakalanya dianggap sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan.

4. Belum optimalnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal terhadap kinerja Polres Batu terutama dalam hal kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM. Lembaga-lembaga pengawas internal seperti Div Propam, Itwasda dan lainnya dirasa belum mampu secara efektif mengungkap dan menindak berbagai bentuk penyimpangan. Sementara mekanisme pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, DPRD juga belum berjalan secara optimal.

Secara umum, meskipun Polres Batu telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, namun aspek penegakan nilai-nilai luhur dalam setiap langkahnya masih perlu terus diperkuat. Tantangan berupa kultur, mental, sistem yang belum sepenuhnya mendukung penerapan Pancasila, demokrasi dan HAM perlu dijawab dengan upaya terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat berupa penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM ini menjadi sangat relevan dan strategis bagi Polres Batu. Program ini diharapkan dapat mendorong transformasi mindset, kultur dan kinerja Polres Batu ke arah yang lebih profesional, humanis, akuntabel dan responsif sesuai harapan masyarakat. Melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dialog publik, dan pelibatan multi stakeholder, program ini menjadi wadah kolaborasi untuk membangun Polres Batu sebagai institusi penegak hukum yang menjadi teladan dalam pengamalan Pancasila, penjamin demokrasi, dan pelindung HAM dalam setiap gerak langkahnya.

Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan landasan ideologis dan filosofis yang harus menjiwai setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam ranah kepolisian ([Pusdatin, 2021](#)). Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan, tindakan, dan perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polres Batu, sebagai bagian integral dari Polri, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga kamtibmas dan menegakkan hukum di wilayahnya.

Selain Pancasila, Polres Batu juga terikat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan tugasnya. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, menempatkan kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, dan rule of law sebagai prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshidqie, 2016). Polri, termasuk Polres Batu, memiliki peran yang vital dalam menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokrasi tersebut melalui perlindungan hak-hak warga negara, penegakan hukum yang adil dan setara, serta penghormatan terhadap kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Selain Pancasila dan demokrasi, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi kewajiban yang melekat dalam setiap tindakan kepolisian. HAM, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya, merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut ([Morgan, 2017](#)). Indonesia, sebagai negara pihak dalam DUHAM dan instrumen HAM internasional, memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM setiap warga negaranya. Polres Batu, sebagai representasi negara dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum, harus memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakannya selaras dengan norma dan standar HAM yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun demikian, dalam realitanya, upaya untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam tindakan kepolisian sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah masih kuatnya pengaruh kultur kepolisian yang cenderung militeristik, yang ditandai dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kekuatan, kepatuhan hierarkis, dan cara-cara represif dalam penanganan kasus ([Raharjo & Angkasa, 2011](#)). Kultur yang demikian dapat berdampak pada minimnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan sipil, dan HAM dalam tindakan kepolisian.

Permasalahan yang dihadapi oleh Polres Batu sebagai mitra dalam program pengabdian masyarakat ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM di kalangan anggota Polres Batu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini tercermin dari masih adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti diskriminasi, penggunaan kekuatan berlebihan, arogansi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap masyarakat. Akar masalahnya antara lain terletak pada kurangnya penekanan terhadap nilai-nilai ini dalam proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan personel, minimnya keteladanan dari para pemimpin, serta lemahnya mekanisme reward and punishment untuk mendorong perubahan perilaku.
2. Masih kuatnya kultur militeristik dalam tubuh Polres Batu yang menghambat upaya transformasi menuju polisi sipil yang humanis dan demokratis. Pendekatan kekuasaan, cara-cara represif, dan kepatuhan buta pada hierarki masih sering mewarnai pola pikir dan tindakan aparat kepolisian dalam penanganan kasus di lapangan. Kultur ini berkontribusi pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan, intimidasi, dan pembiaran.
3. Kompleksitas situasi sosial-politik yang seringkali menuntut respons cepat dan tegas dari kepolisian, yang terkadang mengorbankan prinsip-prinsip Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dalam menghadapi unjuk rasa, konflik sosial, atau gangguan keamanan yang melibatkan massa dalam jumlah besar misalnya, aparat Polres Batu seringkali dihadapkan pada dilema antara efektivitas penanganan dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Tekanan psikologis dan tuntutan

presisi seringkali memaksa aparat untuk mengambil tindakan yang dapat dinilai melanggar nilai-nilai luhur tersebut.

4. Belum efektifnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja Polres Batu dalam menegakkan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Lembaga-lembaga pengawas internal seperti Divisi Propam, Itwasda, dan Itwil dinilai belum mampu secara optimal mengungkap dan menindak berbagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggota. Sementara itu, pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan DPRD juga belum berjalan efektif karena berbagai kendala seperti keterbatasan kewenangan, sumber daya, dan akses informasi.

Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, program pengabdian masyarakat ini menawarkan beberapa solusi strategis sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang intensif, berkala, dan berkelanjutan bagi seluruh anggota Polres Batu tentang nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam konteks tugas kepolisian. Materi pendidikan dan pelatihan ini harus dirancang secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan andragogi yang partisipatif dan aplikatif. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kritis, mengubah cara pandang, serta meningkatkan keterampilan anggota dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam setiap tindakan.
2. Penguatan regulasi, kelembagaan, dan tata kelola Polres Batu yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM. Hal ini mencakup penyusunan atau revisi peraturan-peraturan internal, SOP, serta kebijakan yang secara tegas menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai acuan utama. Selain itu, juga diperlukan penguatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga pengawas internal agar lebih efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak penyimpangan perilaku anggota.
3. Membangun kemitraan dan sinergi yang kuat antara Polres Batu dengan berbagai *stakeholder* seperti akademisi, LSM, media, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mempromosikan dan mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM. Kemitraan ini dapat diwujudkan melalui berbagai program seperti pendidikan publik, kampanye bersama, diskusi terbuka, kerja sama riset dan pengembangan, serta inisiatif pemolisian berbasis masyarakat (*community policing*). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan publik terhadap upaya transformasi Polres Batu.

Mendorong pengembangan budaya organisasi yang lebih terbuka, reflektif, dan adaptif terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM di lingkungan Polres Batu. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang berbasis nilai, pengembangan kepemimpinan yang transformatif dan berintegritas, serta penciptaan iklim organisasi yang kondusif bagi pembaruan dan inovasi. Budaya

organisasi yang mendukung akan menjadi fondasi bagi perubahan perilaku anggota secara berkelanjutan.

METODE

Dalam rangka mewujudkan solusi-solusi yang telah dirumuskan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam tubuh Kepolisian Resor Kota Batu, dibutuhkan serangkaian metode pelaksanaan yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Metode-metode ini pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari solusi-solusi strategis yang telah dibahas sebelumnya, dengan penekanan pada aspek pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan, pelibatan multi-stakeholder, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Batu dengan menerapkan metode hybrid, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan daring melalui platform Zoom Meeting. Sebanyak 6 orang perwakilan dari Polres Batu hadir secara langsung di lokasi kegiatan, sementara 26 orang lainnya berpartisipasi secara virtual dari berbagai lokasi. Komposisi peserta yang beragam ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif.

Peserta yang hadir merepresentasikan berbagai unsur di Polres Batu, mulai dari pimpinan, perwira pertama, bintara, hingga tamtama dari berbagai satuan fungsi seperti Reskrim, Intelkam, Sabhara, Lantas, dan sebagainya. Keberagaman ini penting untuk memastikan bahwa materi dan diskusi yang disampaikan dapat menjangkau dan relevan bagi seluruh elemen organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari lembaga eksternal seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi sebagai narasumber dan pengamat. Keterlibatan multi-stakeholder ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan agenda transformasi Polres Batu.

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan, digunakan berbagai peralatan dan fasilitas yang memadai. Pada ruang pertemuan utama di Polres Batu, disediakan laptop sebagai perangkat utama untuk presentasi materi, pemutaran video, serta akses ke platform Zoom Meeting. Laptop ini terhubung dengan LCD proyektor dan layar besar untuk menampilkan materi secara visual yang memudahkan peserta dalam menyimak dan mencatat poin-poin penting.

Koneksi internet yang stabil dan berkecepatan tinggi juga menjadi faktor krusial dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan secara hybrid. Melalui jaringan WiFi yang tersedia di Polres Batu, seluruh peserta dapat terhubung ke platform Zoom Meeting tanpa kendala teknis yang berarti. Kualitas audio dan video yang jernih memungkinkan komunikasi dan interaksi yang lancar antara narasumber, moderator, dan peserta, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Selain itu, peserta juga difasilitasi dengan materi-materi pendukung seperti handout, modul, dan buku saku yang berisi rangkuman materi, panduan praktis, serta referensi tambahan seputar nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam konteks tugas kepolisian. Materi-materi ini dibagikan secara cetak bagi peserta yang hadir langsung, dan secara digital dalam format PDF bagi peserta daring. Ketersediaan materi

pendukung ini diharapkan dapat membantu peserta dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan partisipatif dengan melibatkan mitra secara aktif dalam setiap prosesnya. Berikut adalah uraian tahapan pelaksanaan program beserta deskripsi masing-masing tahapan:

1. Tahap Persiapan (2 Minggu)

Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi intensif dengan pihak Polres Batu untuk menyusun rencana kegiatan, menentukan jadwal, mengidentifikasi peserta, serta mempersiapkan materi dan logistik yang dibutuhkan. Mitra memberikan input dan pandangan yang berharga terkait kebutuhan dan ekspektasi mereka terhadap program ini, sehingga desain kegiatan dapat disesuaikan secara kontekstual. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan (1 hari)

Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari dengan mengombinasikan berbagai metode seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan berbagai pengalaman. Fokus kegiatan adalah membangun pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM secara filosofis, yuridis, dan sosiologis melalui pemaparan dari para narasumber ahli, pendalaman materi melalui diskusi kelompok dan studi kasus, dimana peserta diminta untuk menganalisis berbagai situasi dilematis yang sering dihadapi dalam tugas kepolisian dan merumuskan respons yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah dipelajari, dan peserta diajak untuk mempraktikkan dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui simulasi, role-play, dan penyusunan rencana aksi sebagai tindak lanjut. Sepanjang pelaksanaan, mitra terlibat secara aktif baik sebagai narasumber,

fasilitator, maupun peserta, sehingga terjadi proses berbagi pengetahuan dan pengalaman yang resiprokal. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 2. Tahap Pelaksanaan (Offline)

Dengan partisipasi aktif mitra dalam setiap tahapan program tersebut, diharapkan dapat terbangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan komitmen yang tinggi dari segenap elemen Polres Batu untuk menjadikan agenda penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai prioritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian. Keberhasilan program ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada kapasitas dan kemauan seluruh pimpinan dan anggota Polres Batu untuk bergerak bersama mewujudkan transformasi menuju polisi yang profesional, humanis, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program pengabdian masyarakat untuk penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM di Polres Batu telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Melalui serangkaian kegiatan yang partisipatif dan kolaboratif antara tim pengabdian dengan mitra, program ini berhasil mencapai tujuan dan memberikan hasil yang positif bagi Polres Batu.

Pada tahap persiapan, kerjasama yang baik antara tim pengabdian dengan Polres Batu menghasilkan perencanaan program yang matang dan kontekstual. Masukan dari mitra terkait kebutuhan, tantangan, dan harapan mereka berhasil diterjemahkan ke dalam desain program yang relevan dan aplikatif. Ini menjadi modal penting bagi suksesnya pelaksanaan program ([Ihsandi et al., 2023](#)).

Selama tahap pelaksanaan, kombinasi metode pembelajaran yang variatif dan interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, wawasan, dan keterampilan peserta terkait nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam tugas kepolisian. Melalui ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan berbagi pengalaman, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan konseptual, tetapi juga belajar mengaplikasikannya dalam situasi nyata ([Istifada Lailatil Musyarrofah, 2024](#)).

Peningkatan kapasitas peserta ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pembelajaran Peserta

Aspek	Pre-Test	Post-Test
Pengetahuan Konseptual	62	92
Pengetahuan Kontekstual	58	88
Kemampuan Aplikasi	52	85
Kemampuan Implementasi	55	90
Rata-Rata	56,8	88,4

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur, dengan rata-rata kenaikan sebesar 31,6. Ini mengindikasikan bahwa program telah berhasil membuka wawasan, memperdalam pemahaman, serta memperkuat keterampilan dan komitmen peserta untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam tugas mereka.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif mitra sebagai subjek pembelajaran. Sepanjang program, peserta dari Polres Batu menunjukkan antusiasme, keterbukaan, dan kesediaan untuk terlibat secara penuh dalam setiap sesi. Mereka berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan kritis, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini mencerminkan adanya semangat belajar dan komitmen untuk berubah yang merupakan prasyarat bagi keberlanjutan program ([Pratama et al., 2024](#)).

Pada akhirnya, keberhasilan program ini harus diukur bukan hanya dari terlaksananya agenda, tetapi lebih jauh dari sejauh mana ia berkontribusi bagi terwujudnya polisi sipil sebagaimana diamanatkan dalam Trisakti Polri: polisi yang profesional, bermoral, dan modern yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati ([Karnavian & Sulisty, 2017](#)). Di situlah, upaya pengabdian masyarakat ini menemukan relevansi dan signifikansinya sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Tujuan Hasil dan Pembahasan adalah untuk menyatakan temuan Anda dan membuat interpretasi dan/atau pendapat, menjelaskan implikasi temuan Anda, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Fungsi utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam Pendahuluan, menjelaskan bagaimana hasil mendukung jawaban dan bagaimana jawaban sesuai dengan pengetahuan yang ada mengenai topik tersebut. Diskusi dianggap sebagai inti naskah dan biasanya memerlukan beberapa upaya penulisan.

Pembahasan

Penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) di tubuh Kepolisian Resor Kota Batu merupakan upaya strategis dan visioner untuk mewujudkan institusi kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini penting dilakukan mengingat Polri, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut dalam setiap aspek tugasnya (Sembiring & Halimah, 2023).

Dalam konteks Polres Batu, upaya ini menjadi sangat relevan dan mendesak, mengingat masih adanya kesenjangan antara idealisme dan realitas dalam praktik pemolisian sehari-hari. Tantangan seperti kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM di kalangan anggota, masih kuatnya kultur militeristik, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal dan eksternal, menjadi permasalahan krusial yang perlu segera dibenahi (Amostian et al., 2023).

Program pengabdian masyarakat ini hadir sebagai respons strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, program ini berupaya untuk mentransformasi mindset, kultur, dan kinerja Polres Batu ke arah yang lebih selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Berbagai metode diterapkan, mulai dari pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas anggota, penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menjamin akuntabilitas, dialog publik untuk membangun kepercayaan masyarakat, hingga riset aksi partisipatif untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan praktik-praktik baik (Asruari, 2020).

Hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran peserta tentang nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam konteks tugas kepolisian. Peningkatan ini dapat diukur secara kuantitatif melalui metode pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung (Sugiyono, 2022).

Pre-test dan post-test ini terdiri dari 25 butir soal pilihan ganda yang mencakup berbagai aspek pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila, demokrasi, dan HAM, baik secara konseptual maupun praktis. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan skor yang signifikan antara pre-test dan post-test pada seluruh peserta, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Skor Pre-Test dan Post-Test Peserta

Statistik	Pre-Test	Post-Test
Mean	56,8	88,4
Median	56	88
Modus	52	92
Minimum	40	76
Maksimum	72	100

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan skor yang substansial antara pre-test dan post-test. Rata-rata skor peserta meningkat dari 56,8 pada pre-test menjadi 88,4 pada post-test, dengan selisih peningkatan sebesar 31,6 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, terdapat peningkatan pemahaman dan penguasaan materi yang signifikan di kalangan peserta setelah mengikuti rangkaian program pengabdian masyarakat ini.

Selain itu, jika dilihat dari distribusi skor, terlihat pula adanya pergeseran yang positif. Pada pre-test, skor terendah peserta adalah 40 dan skor tertinggi adalah 72, dengan mayoritas peserta memperoleh skor di kisaran 50-an. Sementara pada post-test, skor terendah meningkat menjadi 76 dan skor tertinggi mencapai 100 (nilai sempurna), dengan mayoritas peserta memperoleh skor di atas 90. Pergeseran ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara umum, tetapi juga mampu mengangkat peserta yang awalnya memiliki pemahaman minim ke level yang jauh lebih baik (Arikunto, 2015).

Hasil ini mengonfirmasi temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan efektivitas pelatihan dan pendidikan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota kepolisian, khususnya dalam aspek pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan tugas (Sadjijono, 2008). Program pengabdian masyarakat ini dengan demikian telah memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat fondasi pengetahuan dan wawasan anggota Polres Batu sebagai modal awal untuk transformasi kultural dan perilaku yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penting pula untuk dicatat bahwa peningkatan pengetahuan dan wawasan ini barulah langkah awal dalam proses panjang internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam keseharian tugas kepolisian. Diperlukan upaya-upaya lanjutan yang terencana dan konsisten untuk mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi perubahan mindset, sikap, dan perilaku yang nyata. Pada titik inilah, komitmen dan keteladanan para pemimpin Polres Batu, kesolidan seluruh anggota, serta sinergi dengan berbagai stakeholder menjadi kunci bagi keberhasilan agenda besar reformasi Polri ini.

Pada akhirnya, keberhasilan program pengabdian masyarakat ini perlu terus dirawat dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pengetahuan dan wawasan yang telah didapat harus terus diperkaya, disebarluaskan, dan diaktualisasikan dalam setiap gerak langkah Polres Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat. Hanya dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai ruh dan nafas dalam setiap tindakan kepolisian, cita-cita mewujudkan Polri yang profesional dan dicintai rakyat dapat berangsur diwujudkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat untuk penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM di Kepolisian Resor Kota Batu telah dilaksanakan dengan metode yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan pelatihan, pendampingan, dialog publik, dan riset aksi, program ini berhasil membawa perubahan positif dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan

anggota Polres Batu terkait pengamalan nilai-nilai luhur tersebut dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan program ini tercermin dari peningkatan skor pre-test dan post-test peserta yang signifikan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 31,6%. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman, wawasan, dan kompetensi peserta dalam mengimplementasikan Pancasila, demokrasi, dan HAM secara praksis. Selain itu, pelaksanaan program yang melibatkan berbagai unsur dari Polres Batu dan masyarakat telah memperkuat sinergi dan kemitraan strategis dalam membangun polisi yang profesional dan humanis. Manfaat program ini dirasakan langsung oleh anggota Polres Batu yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, serta oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan kepolisian yang lebih prima dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara. Program ini juga berkontribusi pada upaya reformasi Polri secara nasional dengan menjadikan Polres Batu sebagai pelopor dan model dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM. Untuk memastikan keberlanjutan dampak positif ini, disarankan agar Polres Batu dan seluruh pemangku kepentingan melakukan beberapa hal: (1) Terus memperkuat komitmen dan konsistensi pimpinan dan anggota dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek tugas; (2) Melembagakan mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif untuk mengawal penerapan nilai-nilai ini; (3) Menyusun kurikulum dan modul pelatihan yang baku dan sistematis agar dapat direplikasi di kesatuan lain; (4) Meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung program-program serupa secara berkala; dan (5) Memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi, NGO, media, dan elemen masyarakat untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan inovasi di tubuh Polres Batu. Dengan komitmen dan langkah nyata dari semua pihak terkait, diharapkan apa yang telah dicapai melalui program ini dapat terus direplikasi, dikembangkan, dan ditingkatkan, tidak hanya bagi kemajuan Polres Batu, tetapi juga bagi terwujudnya Polri yang dicintai masyarakat dan menjadi pelindung sejati Pancasila dan kedaulatan NKRI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pengabdian masyarakat dengan judul "Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Partisipasi Publik Terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang" dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan pengabdian ini tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang, yang telah memberikan dukungan moral dan administratif dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wisnuwardhana Malang, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan fasilitas dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
3. Kepolisian Resor Kota Batu, yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di wilayahnya.

4. Rekan-rekan dosen dan mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang, yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amostian, Yusriyadi, & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510–522. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>.
- Arikunto, S. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asruari, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 16(1), 113–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jkp.v16i1.367>.
- Asshidqie, J. (2016). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum*. Media dan HAM.
- Ihsandi, A. D., Almizan, & Daredmi, S. (2023). Paradigma Integratif Multidisipliner dalam Mempersiapkan Pada Program Studi Ekonomi Syariah Berdayasaing. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1210–1221. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i4.767>
- Istifada Lailatil Musyarrofah. (2024). Peran Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Pemahaman Materi PAI. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 175–187. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1953>.
- Karnavian, M. T., & Sulisty, H. (2017). *Democratic Policing*. Pensil-324.
- Morgan, A. (2017). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). *Encyclopedia of American Civil Rights and Liberties: Revised and Expanded Edition: Volumes 1-4*, 1–4, 1005–1006. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.universal.declaration.human.rights>
- Pratama, A. R., Rawati, M., Fajri, F., Oktaviany, K., & Messy, M. (2024). Dinamika Organisasi Mahasiswa: Pengembangan, Komitmen, dan Transformasi di Zaman Modern. *Jurnal Manajemen Dan Budaya*, 4(2), 28–38. <https://doi.org/10.51700/manajemen.v4i2.627>
- Pusdatin. (2021). *Ketua MPR: Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. <https://bpip.go.id/berita/ketua-mpr:-pancasila-sebagai-dasar-negara>
- Raharjo, A., & Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389–401.
- Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian, Polri Dan Good Governance*. Surabaya.

- Sembiring, R. K. M., & Halimah. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 1–17.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2, Pemerintah Pusat (2002).